

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Utara sebagai Provinsi dalam perkembangannya telah menjalani proses yang sangat panjang. Dari satu periode keperiode berikutnya telah mengalami berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan wilayah, sistem dan strukturnya. Perubahan-perubahan itulah yang melahirkan sosok-sosok pemimpin Sumatera Utara sesuai dengan perkembangan sistem dan struktur pemerintahannya. Sebagai salah satu bagian wilayah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sumatera Utara pada awalnya telah memiliki pemerintahan tradisional yang mempunyai peran penting terutama dalam hal meletakkan dasar-dasar pembagian wilayah maupun otonomi daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya terutama sejak kedatangan penguasa asing dikawasan Sumatera Utara, corak pemerintahan yang ada sebelumnya mengalami perubahan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang disebut Hindia Belanda mulai diletakkan dasar-dasar pemerintahan yang modern. Maksud pemerintahan yang modern disini adalah suatu sistem dan struktur pemerintahan yang dilakukan atau didistribusikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, objektif dan penempatan aparatur sesuai dengan kemampuan masing-masing.¹⁾

1) Tim Pengumpulan, Penelitian dan Penulisan Sejarah Perkembangan Prop. DATI-I Sumatera Utara .*Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, (Medan 1994), hlm. 4

Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang yang disebut “*Decentralisatiewet*”. Berdasarkan Undang-Undang yang baru ini lahirlah pemerintahan yang

otonom di Indonesia. Kemudian secara *administrative* Pemerintahan Hindia Belanda membagi-bagi kawasan Nusantara dalam beberapa wilayah atau gewestan. Khususnya Pulau Sumatera merupakan wilayah pemerintahan yang disebut *Gouvernement van Sumatera* dikepalai oleh seorang yang berpangkat *Gouverneur* atau Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Wilayah Sumatera kemudian disebut *Province* yang dibagi-bagi kedalam beberapa daerah *administrative* yang dinamakan *residentie* atau keresidenan, salah satunya keresidenan Sumatera Timur. Sistem pemerintahan yang mulai diterapkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda tersebut kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin wilayah atau *gewestan* seperti *Gouverneur* ditingkat *Province* Sumatera.

Salah satu wilayah pemerintahan Sumatera Utara adalah Pulau Nias. Pulau Nias adalah salah satu pulau terluar di gugusan barat pulau Sumatera, yang memiliki latar tradisi politik segmental dan kesatuan etnisitas serta bahasa yang berbeda dari yang berada di Pulau Sumatera, Nias memperindah mozaik budaya Sumatera Utara, tetapi sekaligus juga menambah kompleksitas dari permasalahannya.²⁾

Pulau Nias merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah tertinggal dan miskin diantara beberapa wilayah lainnya. Hal tersebut dibenarkan dari beberapa catatan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan pada masa lampau hingga kenyataan kondisi pada saat ini.

2) *Ibid* hlm. xvii

Baik dari segi perekonomian, pembangunan, hingga pendidikan Pulau Nias masih belum mencapai kemajuan yang pesat. Seperti diungkapkan dalam buku Asal-Usul Masyarakat Nias:

“Sekarang pada peralihan zaman dari milenium kedua hingga ketiga, banyak orang Nias sudah pergi keseberang, “*Mangalui*” katanya, “mencari” pekerjaan, artinya banyak diantara mereka yang pergi keseberang menghilang ditengah hutan atau dikebun kelapa sawit. Mereka kalah bersaing dikota, karena tidak memiliki pendidikan atau ketrampilan.”³⁾

Walaupun merupakan sebuah wilayah yang tertinggal, Nias memberikan sumbangsih terhadap kemajuan bangsa dan negara dengan melahirkan salah satu sosok pemimpin Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 1965-1967.

Salah seorang pemimpin Sumatera Utara yang pernah mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara adalah Roos Telaumbanua yang lebih dikenal dengan nama PR Telaumbanua atau Pendeta Roos Telaumbanua. PR Telaumbanua adalah Gubernur Propinsi Sumatera Utara Ke-10 yang satu-satunya berasal dari Pulau Nias.

PR Telaumbanua sebelum menjadi Gubernur Sumatera Utara, pernah menjabat Bupati Nias, Walikota Medan dan Residen Sumatera Timur. Walaupun PR Telaumbanua hanyalah bersifat sebagai pejabat dalam masa peralihan dari Gubernur sebelumnya Ulung Sitepu sampai ditunjuknya seorang gubernur yang defenitif.

3) Harmmerle, Johannes M. *Asal-Usul Masyarakat Nias*. (Gunungsitoli:2001) Hal 20

Pada masa beliau ini

Pada masa PR.Telaumbanua (18 Oktober 1965-31 Maret 1967) merupakan masa yang tidak panjang karena hanya sampai 17 Bulan. Akan tetapi pada masa inilah merupakan masa yang kompleks karena peralihan kekuasaan telah terjadi di kawasan Sumatera Utara".⁴⁾

Pada era pemerintahan PR Telaumbanua telah melaksanakan penumpasan PKI dan juga pembersihan struktur aparatur pemerintahan propinsi dari oknum-oknum PKI serta usaha-usaha pembangunan diberbagai bidang. Kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan PR Telaumbanua tersebut berdasarkan pada sikap kebijakan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian G-30-S Yang tidak membenarkan pembentukan "Dewan Revolusi". Usaha pembersihan pemerintahan dari pengaruh PKI yang dilaksanakan oleh PR.Telaumbanua juga

didasarkan pada “Surat Perintah Sebelas Maret” (SUPERSEMAR) yang dipegang oleh Presiden Soeharto yang berisi mengenai pembubaran PKI.⁵⁾

Dengan kehadiran dan keberhasilan PR Telaumbanua sebagai Gubernur Sumatera Utara, seharusnya masyarakat Sumatera Utara terutama masyarakat Pulau Nias yang selama ini terpaku pada keterbelakangan dan tertinggal dari daerah-daerah lain yang telah maju dilingkungan Propinsi Sumatera Utara dapat menjadikan PR Telaumbanua sebagai sosok inspirasi untuk turut memajukan Pulau Nias dan Propinsi Sumatera Utara.

Namun, pada kenyataannya bahwa hingga saat ini, masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Nias masih belum mengetahui dan mengenal sosok-

4) Tim Pengumpulan, Penelitian dan Penulisan Sejarah Perkembangan Prop. DATI-I Sumatera Utara .*Op Cit.* hlm. 362

5) Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: 489). hlm. 489

PR Telaumbanua sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 18 Oktober 1965-31 Maret 1967.

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis mengadakan penelitian untuk mengulas dan membahas lebih dalam tentang sosok PR Telaumbanua sebagai Gubernur Sumatera Utara ke-10, dengan judul penelitian **“Tinjauan Historis Terhadap Sosok PR.Telaumbanua (Gubernur Sumatera Utara 1965-1967)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Latar belakang keluarga P.R Telaumbanua
2. Latar belakang pendidikan P.R Telaumbanua
3. Latar belakang perpolitikan P.R Telaumbanua

4. Situasi politik Indonesia pada tahun 1965 yang mempengaruhi pengambilan kebijakan PR.Telaumbanua
5. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh P.R Telaumbanua semasa menjabat Gubernur Sumatera-Utara periode 1964-1965
6. Peranan P.R telaumbanua dalam kancah pemerintahan lokal, Provinsi dan Nasional
7. Apresiasi positif dan negatif masyarakat Sumatera-Utara terhadap sosok PR. Telaumbanua
8. Cita-cita P.R Telaumbanua bagi kemajuan Pulau Nias

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada dimana banyak sekali faktor yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dan terbatasnya waktu, biaya dan tenaga peneliti serta analisis yang dikuasai maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus.⁶⁾

Oleh karena itu penelitian dibatasi berdasarkan identifikasi masalah yaitu latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan dan politik PR. Telaumbanua, Pembatasan masalah ini hanya meliputi latar belakang kehidupan PR. Telaumbanua sebelum menjadi Gubernur Sumatera-Utara hingga Beliau menjadi pemimpin Provinsi Sumatera Utara serta mengulas tentang kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh P.R Telaumbanua selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara tahun 1965-1967.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Latar belakang kehidupan pribadi PR.Telaumbanua?
2. Apa saja kebijakan PR.Telaumbanua selama menjabat Gubernur Sumatera-Utara?
3. Bagaimana apresiasi positif dan negatif masyarakat Nias terhadap sosok PR.Telaumbanua?

6) Hartono.*Metodologi Penelitian*. (Pekanbaru:2001) hlm 25

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

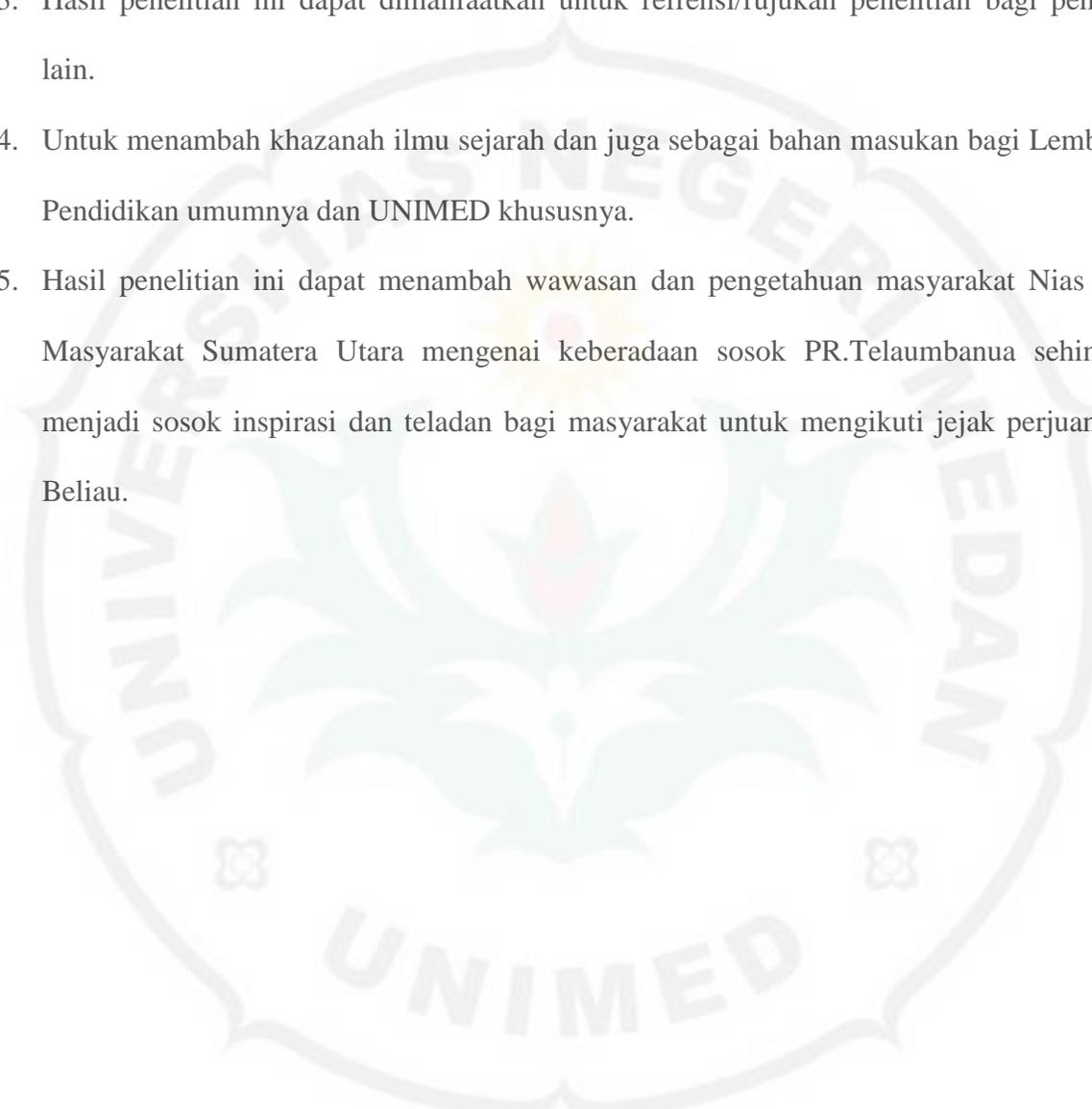
1. Bagaimana Latar belakang kehidupan pribadi PR.Telaumbanua?
2. Untuk mengetahui Kebijakan PR. Telaumbanua selama menjadi Gubernur Sumatera-Utara periode 1965-1967
3. Untuk mengetahui apresiasi positif dan negatif masyarakat Nias terhadap sosok PR. Telaumbanua

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Memberi informasi bagi pembaca tentang latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan dan politik PR.Telaumbanua
2. Memberi informasi bagi pembaca tentang peran dan Kebijakan PR.Telaumbanua semasa menjadi Gubernur Sumatera-utara periode 1965-1967

3. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi/rujukan penelitian bagi peneliti lain.
4. Untuk menambah khazanah ilmu sejarah dan juga sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pendidikan umumnya dan UNIMED khususnya.
5. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Nias dan Masyarakat Sumatera Utara mengenai keberadaan sosok PR.Telaumbanua sehingga menjadi sosok inspirasi dan teladan bagi masyarakat untuk mengikuti jejak perjuangan Beliau.



UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY